

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.1 Pengertian Laporan keuangan Pemerintah Daerah

Laporan Keuangan merupakan laporan yang struktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi tentang posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan pemerintah daerah

- a. Laporan Keuangan Menurut SAK Antara lain
 1. Laporan Laba Rugi
 2. Laporan Arus Kas
 3. Laporan Perubahan Modal
 4. Neraca
 5. Catatan Atas Laporan Keuangan
- b. Laporan Keuangan Daerah Menurut Entitas Pelaporan
 1. Laporan Realisasi Anggaran
 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
 3. Neraca
 4. Laporan Operasional

5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Laporan Arus kas
7. Catatan Atas Laporan Keuangan

2.1.3 Pengertian Analisis Keuangan

Analisis interpretasi laporan keuangan bagi mereka yang berkepentingan adalah perlu sebagai dasar pengambilan keputusan, sehingga keputusan yang diambil itu tepat.

Menurut Sinaga (2014:220) analisis laporan keuangan adalah analisis yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari dari pada hubungan dan tendensi atau kecenderungan untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Hery (2015:132) analisis laporan keuangan merupakan suatu proses dalam membedakan laporan keuangan ke dalam unsurnya dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut yaitu dengan suatu tujuan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri.

Menurut Harahap, S.S (2013: 132) analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian yaitu analisis dan laporan keuangan. Kata analisis adalah memecahkan atau mengurangi suatu unit menjadi berbagai unit terkecil. Sedangkan laporan keuangan adalah neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas.

Pengertian laporan keuangan secara umum adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat pada suatu keadaan keuangan perusahaan , bagaimana pencapaian keberhasilan perusahaan masa lalu, saat ini, dan prediksi masa depan.

2.1.4 Metode dan Teknik analisis laporan keuangan

Dalam melakukan analisis terhadap laporan keuangan suatu perusahaan dapat dipergunakan beberapa metode dan Teknik analisis, alat untuk mengukur hubungan antara pos-pos yang ada dalam laporan keuangan sehingga diketahui dari masing-masing pos tersebut. Metode-metode analisis yang umum digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Analisis statis dalam metode ini analisis laporan keuangan dilakukan dengan cara membandingkan pos yang satu dengan pos lainnya dalam laporan keuangan pada suatu periode tanpa mengetahui perkembangannya
2. Analisis dinamis atau analisis horizontal ini menganalisis laporan keuangan dengan cara membedakan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan juga perkembangan yang terjadi.
3. Analisis rasio adalah suatu metode untuk mengetahui perubahan dari pos-pos tertentu dalam neraca atau laporan laba rugi secara individual atau kombinasi dari kedua laporan tersebut.

2.2 Analisis kinerja keuangan

2.2.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang atau pegawai yang menghasilkan output, efisien, efektifitas yang berkaitan dengan produktifitas secara kualitas maupun kuantitas sesuai yang dipertanggungjawaban (Mangkunegara: 2002). Dapat diartikan juga kinerja merupakan hasil keberhasilan seseorang atau kelompok individu dalam melakukan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang dapat menghasilkan output atau tingkah laku dalam suatu periode dalam mencapai tujuan individu tau kelompok di sebuah instansi atau organisasi.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan sebagai dasar untuk melakukan pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dapat menggunakan sistem penilaian (rating) yang relevan. Rating tersebut harus mudah digunakan sesuai dengan yang akan diukur, dan mencerminkan hal-hal yang memang menentukan kinerja. Pengukuran kinerja keuangan juga berarti membandingkan antara standar yang telah ditetapkan dengan kinerja keuangan yang ada di dalam perusahaan. Pengukuran kinerja keuangan bersifat kuantitatif dengan berdasarkan pada laporan keuangan.

2.2.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut mangkunegara dalam Mulyadi (2015:63) menyatakan bahwa factor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah:

1. Faktor kemampuan secara psikologi, kemampuan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (Knowledge + skill). Artinya pimpinan dan karyawan yang memiliki IQ di atas rata (IQ 110-120) dengan Pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka akan lebih mudah mengerjakan kerja maksimal
2. Faktor motivasi diartikan suatu sikap pimpinan dan karyawan terhadap situasi kerja dilingkungan organisasinya mereka bersikap positif terhadap situasi kerjanya akan menunjukkan motivasi kerja tinggi sebaliknya jika mereka menunjukkan motivasi negative maka motivasi kerja yang rendah.

2.2.3 Metode Penilaian Kinerja

Terdapat beberapa metode dalam kinerja sebagai diungkapkan oleh Widodo (2015:147) yaitu:

1. *Rating scales* menilai kinerja pegawai dengan menggunakan skala untuk mengukur faktor-faktor kinerja misalnya mengukur tingkat inisiatif dan tanggungjawab pegawai
2. *Critical incidents* metode ini penilai harus menyimpan catatan tertulis tentang Tindakan-tindakan atau perilaku kerja positif dan negative
3. *Essay* metode ini cenderung lebih memusatkan perhatian pada perilaku ekstrem dan tugas-tugas karyawan dari pada pekerjaan atau kinerja rutin yang mereka lakukan dari hari ke hari.

4. *Work Standard* metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya
5. *Rangking* metode ini membandingkan kinerja setiap karyawan dengan peringkat yang telah disusun berdasarkan kinerja secara keseluruhan contohnya pekerja terbaik dalam suatu bagian.
6. *Forced Distribution* penilaian yang harus memasukan individu dari kelompok kerja kedalam sejumlah kategori yang serupah dengan sebuah distribusi frekuensi normal.
7. *Behaviourrally Anchored Ranting Scales (BARS)* evaluator menilai pegawai berdasarkan beberapa jenis perilaku kerja yang mencerminkan dimensi kiinerja dan membuat skalannya.

2.2.4 Kinerja Keuangan Dalam Pemerintah Daerah

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan dalam menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan, dan bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatuhan manfaat untuk masyarakat. Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas untuk menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan. masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan adalah menggunakan

analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

Kemampuan pemda dalam mengelolah keuangan dituangkan dalam Anggaran Pendaapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemda dalam membiayi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat. Pemda sebagai pihak yang diserahi tugas wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemda berhasil menjalani tugasnya dengan baik atau tidak. Salah satu menganalisis kinerja pemda dalam mengelolah keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan.

2.2.5 Manfaat Pengukuran Kinerja

Adapun manfaat dari pengukuran kinerja adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengukur prestasi yang telah diperoleh suatu organisasi secara keseluruhan dalam suatu periode tertentu
2. Untuk menilai pencapaian per departemen dalam memberikan kontribusi bagi perusahaan secara keseluruhan.
3. Sebagai dasar penentun strategi perusahaan untuk masa yang akan datang.
4. Untuk memberikan petunjuk dalam membuat keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya.

5. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas perusahaan bank pada suatu periode tertentu.

2.3 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang menggambarkan perkiraan pengeluaran untuk membiayai kegiatan dan proyek daerah selama periode satu tahun dan menggambarkan perkiraan dan sumber penerimaan daerah untuk menutupi pengeluaran (Halim dan Kusufi:2014) APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Rencana kegiatan suatu daerah, beserta urainnya secara rinci
- b. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- c. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka
- d. Periode anggaran, biasanya 1 tahun
- e. APBD dalam pemerintah daerah berguna sebagai rencana perkiraan tinggi biaya pemasukan dan pengeluaran anggaran dalam kegiatan dan proyek dalam periode anggaran 1 tahun.

Dimana didalam APBD sebagai anggaran daerah memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Rencana, jenis, dan bentuk proyek dalam bentuk angka maupun uraian dalam satu periode
- b. Batas minimal target dan batas maksimal target pendanaan maupun pengeluaran aktivitas

2.3.2 Proses Penyusunan APBD

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, proses penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sejalan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD
2. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Daerah Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat Daerah.
3. Dalam rangka penyusunan RAPBD, kepada satuan kerja perangkat daerah selaku pengguna anggaran Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah tahun berikut
4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) satuan kerja perangkat daerah disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai dan perkiraan belanja.

5. Rencana kerja dan anggaran (RKA) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.
6. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya
7. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukung kepada DPRD
8. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD
9. DPRD yang mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD
10. APBD yang disetujui oleh DPRD terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi program, kegiatan dan jenis belanja.

2.3.3 Prinsip Dan Kebijakan Penyusunan APBD

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, prinsip penyusunan dan kebijakan APBD adalah sebagai berikut :

1. Prinsip penyusunan APBD

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan urusan dan kewenangannya
- b. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD
- d. Partipatif dengan melibatkan masyarakat
- e. Memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan
- f. Tidak bertentang dengan kepentingan umum peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan daerah lainnya.

2. Kebijakan penyusunan APBD

Kebijakan penyusunan APBD terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang tertakar secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya

1) Daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran pajak daerah dan Retribusi daerah
- b) Penganggaran Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah
- c) Penggunaan Lain-lain PAD yang sah

2) Dana Perimbangan

- a) Penganggaran Dana Bagi hasil (DBH)
- b) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU)
- c) Penganggaran dana Alokasi Khusus (DAK)

3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- a) Penganggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS)
- b) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG)
- c) Penganggaran dana Otonomi Khusus
- d) Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID)
- e) Pendapatan yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang bersumber dari APBN dalam rangka membiayai penyelenggara pemerintah, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan
- f) Penganggaran dana transfer lainnya
- g) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja bagi hasil pajak daerah dari pemerintahan provinsi
- h) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan baik yang bersifat umum maupun yang khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintahan kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan.

- i) Penganggaran dianggarkan pendapatan hibah yang sumber dari pemerintahan, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga baik dari badan, Lembaga, organisasi swasta dalam negeri maupun luar negeri dianggarkan APBD setelah adanya kepastian pendapatan yang dimaksud
- j) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga baik dari badan, Lembaga, organisasi swasta dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi.
- k) Dalam hal ini pemerintahan daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain, pendapatan daerah yang sah, dan diuraikan dalam jenis objek dan rincian objek pendapatan dana darurat.

b. Belanja Daerah

Pemerintah daerah menetapkan target pencapaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program kegiatan. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memeperjelas evektivitas dan efesiensi penggunaan anggaran.

1. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja pegawai, merupakan belanja untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah
- 2) Belanja barang dan jasa, merupakan belanja untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan atau pemaakaan jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah mencakup belanja barang habis pakai, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, sewa rumah/Gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai.
- 3) Belanja Modal, merupakan belanja untuk pembelian atau pengadaan asset tetap terwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, Gedung, dan asset lainnya

A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja pegawai, merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri, sipil yang ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan

2. Belanja bunga, merupakan belanja untuk pembayaran bunga hutang yang dihitung atas keajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka Panjang, dan menengah.
3. Belanja subsidi, merupakan belanja untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan / Lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak
4. Belanja hibah, merupakan belanja untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya atau kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Belanja bagi hasil pajak, merupakan belanja dari bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan.
6. Belanja bantuan keuangan, belanja untuk bantuan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi ke kabupaten/kota, pemerintah desa, dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan
7. Belanja tidak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial yang tidak perkiraan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

c. Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan daerah, definisi pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Analisis pembiayaan meliputi:

1. Analisis penggunaan SILPA tahun lalu
2. Analisis pembentukan dan penggunaan dana cadangan
3. Analisis investasi
4. Analisis divestasi dan privatisasi
5. Analisis piutang daerah
6. Analisis pinjaman daerah

2.4 Rasio Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah perlu diperhatikan penggunaannya. menurut Mashun (2011:135) Analisis laporan keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan. Penggunaan analisis rasio pada sektor public khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya.

Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam

APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim 2012:4). Analisis rasio keuangan dilakukan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibanding dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi.

Menurut Abdul Halim (2012:4) adapun pihak-pihak yang memiliki berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD ini yaitu: pihak DPRD, pihak eksekutif, pihak pemerintah pusat, serta masyarakat dan kreditor. Ada beberapa cara mengukur kinerja keuangan daerah salah satunya yaitu dengan menggunakan rasio. Rasio ini digunakan untuk mengukur pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

2.4.1 Pendapatan Daerah

a. Rasio Efektivitas Pendapatan

Rasio Eektivitas Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (dianggarkan) rumus rasio ini sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.1
Penilaian Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Presentase Efektivitas
Sangat Efektif	> 100%
Efektif	100%
Cukup Efektif	90% - 99%
Kurang Efektif	75% - 89%
Tidak Efektif	< 75%

Sumber: Mahmudi (2019)

b. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pendapatan asli daerah dengan total penerimaan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap Total penerimaan Daerah. Semakin tinggi Kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi.

$$\text{Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.2
Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Kriteria	Presentase
Sangat Kurang	0%-10%
Kurang	10%-20%
Cukup	20%-30%
Sedang	30%-40%
Baik	40%-50%
Sangat Baik	>50%

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 2010

c. Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan, sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya dari bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah biasanya dalam bantu dana alokasi umum (DAU) maupun dana alokasi khusus (DAK) ataupun dari pinjaman. Rasio kemandirian dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Daerah atau Provinsi dan Pinjaman}} \times$$

100%

Tabel 2.3
Kriteria Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kriteria Kemandirian	Presentase Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0%-25%	Intruktif
Rendah	25%-50%	Konsultatif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75-100%	Delegasi

Sumber: Abdul Halim, 2001

Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber daya eksetr. Semakin tinggi rasio kemandirian berartitingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah. Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

d. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah provinsi. Rasio ini dirumuskan sebagai Berikut

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Tabel 2.4
Kriteria Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase Pendapatan Transfer Terhadap Total pendapatan	Ketergantungan keuangan Daerah
0%-10%	Sangat Rendah
10%-20%	Rendah
20%-30%	Sedang
30%-40%	Cukup
40%-50%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: Bisma dan Susanto: 2010

e. Rasio Efisiensi Pendapatan

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan biaya yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk memperoleh PAD dengan Realisasi penerimaan PAD. Untuk dapat menghitung rasio ini diperlukan data tambahan yang tidak tersedia di laporan realisasi anggaran yaitu data tentang pemungutan PAD Rumus rasio efisiensi dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Biaya Perolehan PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2.5
Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah

Kriteria Efisiensi	Rasio Efisiensi
Sangat Efisien	< 10%
Efisien	10% - 20%
Cukup Efisien	21% -30%
Kurang Efisien	31% - 40%
Tidak Efisien	> 40%

Sumber: Mahmudi (2019)

f. Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan pendapatan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan,

pendapatan secara positif ataukah negative. Rumus rasio pertumbuhan sebagai berikut:

Pertumbuhan Pendapatan th t

$$= \frac{\text{Pendapatan Th } t - \text{pendapatan Th } (t - 1)}{\text{Pendapatan Th } (t - 1)} \times 100\%$$

(Keterangan: Th = Tahun T = Tahun yang dihitung T-1 = Tahun sebelumnya)

g. Derajat Kontribusi BUMD

Rasio ini bermanfaat untuk mengetahui tingkat kontribusi perusahaan daerah dalam mendukung pendapatan daerah. Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan penerimaan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan total penerima pendapatan asli daerah.

$$\text{Derajat Kontribusi BUMD} = \frac{\text{Penerimaan Bagian Laba BUMD}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tabel 2.6
Kriteria Kontribusi BUMD

Kriteria Efisiensi	Presentase Efisiensi
Sangat Baik	>50%
Baik	40%-50%
Sedang	30%-40%
Cukup	20%-30%
Kurang	10%-20%
Sangat Kurang	<10%

Sumber: Abdul Halim, 2004

2.4.2 Belanja Daerah

a). Analisis Pertumbuhan Belanja

Analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun pada umumnya belanja memiliki kecenderungan selalu naik. Alasan kenaikan belanja biasanya

dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflansi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian factor makro ekonomi

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } t = \frac{\text{Realisasi Belanja thn } t - \text{Realisasi Belanja } (t - 1)}{\text{Realisasi Belanja } t - 1}$$

Tabel 2.7
Kriteria Pertumbuhan Belanja Daerah

Kriteria	Presentase
Rendah	0%-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

Sumber: Muhammad Zuhri dan Ahmad Soleh

b). Rasio Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antar belanja. Hal ini terait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi dan stabilisas. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran tersebut berjalan dengan baik, Maka pemerintah daerah perlu membuat harmonisasi belanja. Analisis Rasio Keserasian Belanja antara lain berupa:

1) Rasio Belanja Per Fungsi Terhadap Total Belanja

Rasio belanja ini sangat penting untuk mengetahui pola dan orientasi pengeluaran daerah. Selain itu informasi ini juga untuk menilai apakah pemerintah daerah sudah melaksanakan ketentuan perundangan.

$$\text{Rasio Belanja Per Fungsi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Fungsi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

2) Rasio Belanja Operasional

Rasio belanja operasional merupakan perbandingan antara realisasi belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja yang pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang memberi manfaat jangka pendek.

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

Tabel 2.8

Kriteria Efisiensi Belanja Daerah

Kriteria Efisiensi Belanja	Presentase Efisiensi Belanja
Efisien	<100%
Efisiensi Berimbang	=100%
Tidak Efisien	>100%

Sumber: Mohamad Mahsun (2012)

3) Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total

$$\text{Rasio belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100$$

total belanja daerah adalah antara 5-20 persen. Rasio ini dirumuskan sebagai berikut

Tabel 2.9

Kriteria Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja

Kriteria Keserasian Belanja Modal	Presentasi Keserasian Belanja Modal
Sangat Serasi	> 100 %
Serasi	90 – 100 %
Cukup Serasi	80 -90 %
Kurang Serasi	60 – 80 %
Tidak Serasi	< 60 %

4) Total Belanja Langsung

Belanja langsung dikategorikan sebagai biaya teknik belanja langsung dapat dikendalikan melalui manajemen aktivitas penetapan standar belanja dan standar harga unit

$$\text{Rasio belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

5) Total Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung dikategorikan sebagai biaya kebijakan belanja ini dapat dikendalikan melalui penetapan anggaran ketat dan efisiensi anggaran.

$$\text{Rasio Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

c). Rasio Efisiensi Belanja

Rasio ini merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah, angka yang dihasilkan oleh rasio ini bersifat absolut tetapi relative. Rumus rasio ini sebagai berikut :

$$\text{Rasio efisiensi belanja} = \frac{\text{realisasi belanja}}{\text{anggaran belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2.10
Kriteria Efisiensi Belanja

Kriteria Efisiensi	Presentase efiseinsi
Tidak Efisien	> 100
Kurang Efisien	> 90 -100
Cukup Efisien	> 80 – 90
Efisien	> 60 -80
Sangat Efisien	> 60

2.4.3 Pembiayaan Daerah

Pos sisa lebih pembiayaan anggaran dalam laporan realisasi anggaran merupakan sisa lebih anggaran tahun lalu. Pada umumnya pos SILPA akan menjadi alternatif pertama yang akan digunakan pemerintah daerah apabila terjadi defisit anggaran. Jumlah dana SILPA dapat diketahui pada akhir periode anggaran, yaitu 31 Desember, SILPA pada akhir tahun dihitung sebagai berikut :

- a. Analisis Penggunaan SILPA tahun lalu

$$\text{SILPA} = \text{Surplus / Defisit} + \text{Pembiayaan Neto}$$

Sumber: Mahmudi

- b. Pertumbuhan setiap Item Pembiayaan

$$\text{Rasio Pertumbuhan Pembiayaan} = \frac{\text{pembiayaan thn } t - \text{pembiayaan } t-1}{\text{pembiayaan } (t-1)} \times 100$$

Sumber: Mahmudi

2.5 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis kinerja keuangan.

Tabel 2.11
Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian	Judul Penelitian	Metode penelitian	Hasil Penelitian
1	Norma (2019)	Analisis kinerja keuangan pada badan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Enrekang	Analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan secara umum kinerja keuangan daerah Kabupaten Enrekang sudah baik dalam mengelola keuangan pendapatan asli daerah. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan rasio efektivitas dikategorikan efektif karena rata-rata efektivitas di atas 90 % sedangkan rasio pertumbuhan secara positif yaitu 36,255% dan rasio pertumbuhan belanja daerah sebesar 112,125%
2	Zakaria Anshori (2019)	Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2016-2018	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam merealisasi PAD dan pajak daerah tergolong efisien karena biaya yang relatif sedikit pemerintah Kabupaten Lamongan dapat merealisasi penerimaan PAD dan pajak Daerah namun demikian tingkat derajat desentralisasi ketergantungan, kemandirian kinerja keuangan Kabupaten Lamongan sangat rendah sehingga dalam kegiatan pemerintahnya masih bergantung pada pemerintah pusat

3	Diah Argariny Victoria Untu (2019)	Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2013-2016	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas dapat dikategorikan tidak efektif, rasio efesiensi tergolong tidak efisien, rasio keselarasan menunjukkan lebih banyak realisasi belanja operasi dari pada belanja modal hal ini kurang begitu baik. Rasio pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan positif setiap tahun dan rasio kemandirian tergolong masih sangat rendah dan pola hubungan termasuk instruktif yang menunjukkan bahwa peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.
4	Mega Oktavia Ropa (2016)	Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan	Analisis kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, rasio efektivitas dapat dikategori efektif, rasio efesiensi kurang efisien, rasio kemandirian pengolahan keuangandaerah masih sangat rendah, rasio aktifitas pertumbuhan kurang baik, untuk pertumbuhan pendapatan asli daerah, belanja rutin, dan belanja pembangunan
5	Sandy Candra I wayan Suwendra (2018)	Analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan	Analisis Kuantitatif	Hasil penelitian Menunjukkan bahwa (1) varian pendapatan termasuk dalam kategori baik (2) rasio

		Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Jembranatahun		derajat Desentralisasi termasuk dalam kategori sangat kurang (3) Rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kategori rendah sekali (4) rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan pertumbuhan positif (5) varian belanja termasuk dalam kategori baik (6) rasio keserasin belanja menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional (7) rasio efesiensi belanja termasuk dalam kategori Efisien
--	--	---	--	---

2.6 Kerangka Berpikir

Analisis kinerja keuangan pada pemerintah Daerah Kabupaten Ende perlu adanya rasio keuangan sebagai acuan dalam menganalisis kinerja keuangan. Dalam menganalisis kinerja keuangan, ada lima rasio yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio keserasian belanja, rasio efesiensi keuangan daerah, dan rasio pertumbuhan. Dengan melihat hasil rasio tersebut dapat diketahui kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Ende. Untuk memperjelas konsep dan arah penelitian maka peneliti membuat kerangka konsep sebagai berikut:

Gambar 2.12
Kerangka Berpikir

